

ANALISIS KESIAPAN TENAGA KERJA UNTUK PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

Daud Kosay¹⁾, Harmonis Rante²⁾, Dewi Ana Rusim³⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

^{2), 3)} Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Alamat Korespondensi
e-mail: harmonisrante72@yahoo.co.id

ABSTRACT

Jayawijaya as the parent regency in the Central Highlands Region of Papua Province, is the economic center as well as a buffer for the 6 new divisions in the Lapago customary area. This is because the flow of goods and services mobilization that enters the central mountainous region (Lapago) only uses airplanes and the location of the airport is in Wamena City, Jayawijaya Regency. Jayawijaya as the parent regency in the central mountainous region of Papua province, is an economic center as well as a buffer for the 6 expansion districts in the Lapago customary area. This is because the flow of goods and services mobilization that enters the central mountainous region (Lapago) only uses airplanes and the location of the airport is in Wamena, Jayawijaya Regency. regulation. The existence of a policy regulation of the Special Autonomy Law provides opportunities for the Balinese people to get opportunities, both in the fields of education, health and community economic empowerment and infrastructure. The high unemployment rate in Jayawijaya Regency is due to the low level of Human Resources (HR) in the context of absorbing local workers in accordance with the local job market in Jayawijaya district. So Regional Development is very important to increase competitiveness between regions, increase economic growth, reduce inequality between regions, and advance people's lives. Strategic and quality regional development is the hope in Jayawijaya Regency. In this regard, the Government is required to prepare Human Resources (HR) who have competitiveness in the Global Job Market. To prepare human resources to have competitiveness, this can be done, among others, through job training that is carried out in a structured, systematic and professional manner so that output is produced as expected, namely a competent workforce.

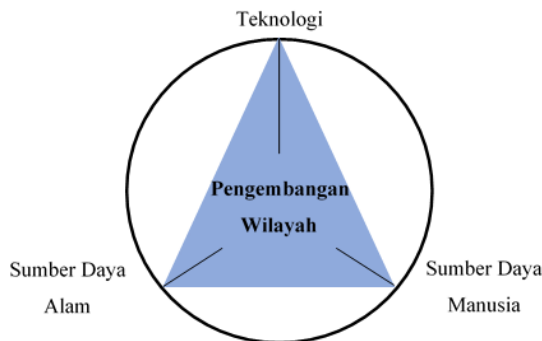
Keywords: Manpower Readiness, Regional Development

1. PENDAHULUAN

Pengembangan wilayah jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, secara umum berorientasi pada meningkat atau menurunnya produktivitas wilayah dengan indikatornya adalah jumlah penduduk, pendapatan, kesempatan kerja, dan *additional*

value (nilai tambah) dari sektor industri pengolahan. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang sosial, pengembangan wilayah berfokus terhadap tujuan agar terjadinya perubahan dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang atau maju yang terjadi secara bertahap dan diharapkan dapat membantu

pengembangan daerah sekitarnya. Zen dalam Alkadri (2001) mendefinisikan pengembangan wilayah sebagai suatu bentuk hubungan yang tercipta antara sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat yang berjalan secara harmonis dengan mempertimbangkan daya tampung. Seperti dalam gambar. 1. berikut.



Gambar 1. Hubungan Antar Elemen Pembangunan
Sumber : Zen dalam Alkadri, Tahun 2001

Riyadi (2002) berpendapat bahwa dalam keberhasilan pengembangan wilayah terdapat 3 faktor, yaitu produktivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Produktivitas dalam keberhasilan pengembangan wilayah diukur dengan ada tidaknya perkembangan produktivitas institusi termasuk aparat yang ada di dalamnya. Efisiensi dalam keberhasilan pengembangan wilayah diukur dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi yang digunakan dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat diukur berdasarkan adanya jaminan terhadap suatu program dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di suatu wilayah.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan

tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Di Indonesia pengertian tenaga kerja atau man power mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan yang melakukan kegiatan lainnya. (Simanjuntak, 2001: 2).

Pendekatan penggunaan tenaga kerja (*Labor Utilization Approach*) menitikberatkan pada seseorang apakah dia cukup dimanfaatkan dalam pekerjaan, dilihat dari jumlah jam kerja, produktifitas kerja dan pendapatan yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, angkatan kerja dibagi dalam 3 golongan, yakni:

- 1) Orang yang menganggur yaitu orang yang sama sekali tidak bekerja (*open employed*) dan berusaha mencari pekerjaan.
- 2) Orang yang setengah menganggur (*under employed*) yaitu mereka yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja (*under utilized*) dilihat dari segi jam kerja, produktifitas bekerja dan pendapatan.
- 3) Orang yang bekerja penuh atau cukup untuk dimanfaatkan (Simanjuntak, 2001: 15-16)

Pengangguran merupakan masalah utama yang dihadapi Pemerintah Provinsi Papua Maupun Kabupaten Kota yang ada di Tanah Papua yang dampaknya dapat mengakibatkan kerawanan sosial yang kurang menguntungkan. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang OTONOMI KHUSUS Nomor 21 Tahun 2001, Sebagai Kabupaten Induk dari beberapa Kabupaten Pemekaran yang berada di wilayah Pegunungan Tengah Papua, Kabupaten Jayawijaya memiliki jumlah pertumbuhan pasar kerja yang besar namun untuk penyerapan Tenaga Kerja Lokal, masih terkendala dengan skill atau keahlian khusus sehingga hal ini menimbulkan angka pengangguran tenaga kerja lokal yang kian tahun semakin bertambah seperti kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 sebagai berikut.

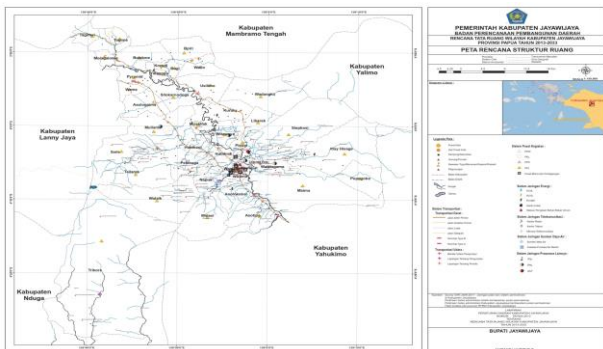
Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kegiatan Kabupaten Jayawijaya

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Angkatan Kerja	73,952	59,426	133,378
2	Bekerja	72,388	58,826	131,214
3	Pengangguran	1,564	600	2,164
4	Bukan Angkatan Kerja	8,532	16,609	25,141
Jumlah				291.897

Sumber: BPS Kabupaten Jayawijaya 2021

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jayawijaya – Provinsi Papua.



Gambar 2. Peta Rencana Struktur Ruang
Sumber: RTRW Kabupaten Jayawijaya 2013-2023

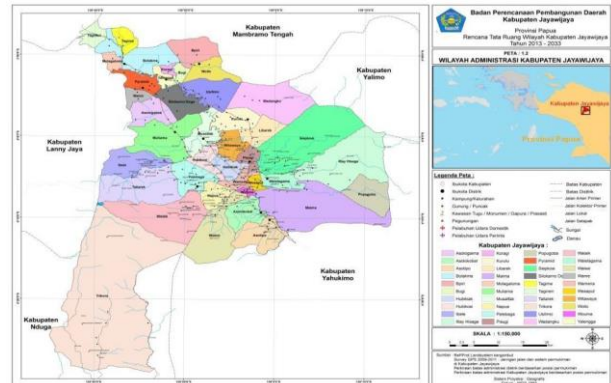
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui observasi, wawancara, dan questioner. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui instansi/dinas terkait dan hasil penelitian sebelumnya.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang mengacu kepada pendapat Miles dan Huberman (1992: 16) yaitu yang mengemukakan langkah analisis data yang terdiri atas tiga alur, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara administrasi, luas Kabupaten Jayawijaya adalah 13.925,31 Km² yang terdiri dari

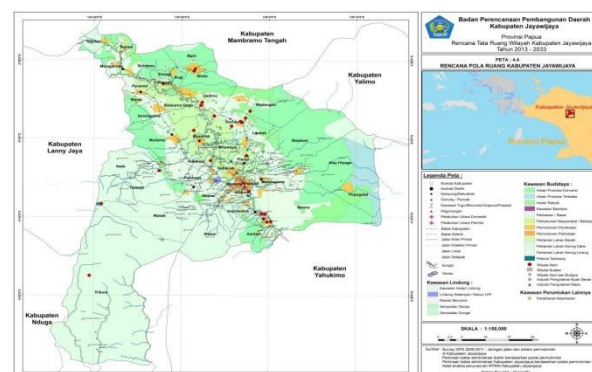
40 (empat puluh) Distrik, 4 Kelurahan dan 328 kampung. Distrik Pelebeaga memiliki jumlah kampung terbanyak dengan 13 Kampung sementara Distrik Pupugoba dan Wame memiliki jumlah kampung/kelurahan paling sedikit yaitu sebanyak 4 kampung/kelurahan.



Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Jayawijaya
Sumber : Peta Survey GPS Tahun 2011

Jumlah penduduk di Kabupaten Jayawijaya tercatat sebesar 269.553 jiwa dengan Jumlah penduduk laki-laki sebesar 140.584 jiwa dan perempuan sebesar 128.969 jiwa.

Merujuk pada RTRW Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2033, pengembangan wilayah di Kabupaten Jayawijaya diarahkan pada pengembangan kawasan untuk hutan produksi, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, dan pariwisata. Arah pengembangan kawasan dapat dilihat pada rencana pola ruang Kabupaten Jayawijaya pada gambar berikut ini:



Gambar 4. Pola Ruang Kabupaten Jayawijaya
Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2033

Kelompok masyarakat di Kabupaten Jayawijaya terdiri masyarakat suku dani, Suku Nduga dan Suku Yali serta penduduk pendatang dari pulau-pulau yang ada di Papua ataupun luar Papua. Kelompok suku dani sebagai penduduk asli di Kabupaten Jayawijaya memiliki jumlah yang cukup besar dengan kehidupan budaya yang masih kental.

Kebudayaan dan norma dan adat istiadat di Kabupaten Jayawijaya hampir sama dengan wilayah lain di Papua. System kepemimpinan yang ada sangat erat kaitannya dengan kepemilikan dan kekuasaan tanah. Sistem ini menentukan perkembangan individu-individu atau kelompok-kelompok etnis yang ada di papua pada umumnya dan Jayawijaya pada khususnya.

Perdagangan merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang tidak terlepas dari aktivitas produksi pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Jayawijaya. Perdagangan di Kabupaten Jayawijaya didominasi oleh jasa dan pertokoan khususnya di Distrik Wamena Kota. Barang dalam proses perdagangan di Kabupaten Jayawijaya masih tergantung dari Luar Kabupaten Jayawijaya dengan menggunakan Moda Transportasi Udara. Dengan dibukanya trans papua beberapa akses jalur darat menuju ke Jayawijaya baik dari jayapura maupun daerah sekitarnya mulai dibuka. Sehingga harapan kedepan, mampu mendorong aktivitas perdagangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Tabel 2. Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Menurut Klasifikasi Industri di Kabupaten Jayawijaya, 2020

No	Klasifikasi industri	Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Produksi
1	Makanan	134	743	1.807.443
2	Minuman	34	66	611.646
3	Pengolahan Tembakau	-	-	-
4	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	137	615	3.259.180

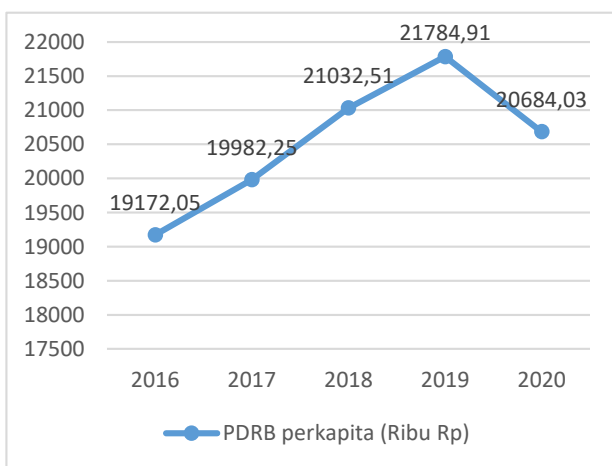
Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Dalam Angka (DDA), Tahun 2020

Kabupaten Jayawijaya memiliki sekitar 12 pasar, dimana Pasar Jibama merupakan pasar terbesar dengan los pasar yang terisi sebanyak 320 unit, kios 4 unit dan dasaran sebanyak 108 unit. Selanjutnya Pasar Kimbim terdapat 215 unit los yang terpakai. Dengan peningkatan iklim perekonomian yang kondusif. Dengan aktivitas transportasi yang terhubung antar kabupaten dan lingkungan, maka permintaan akan los pasar akan meningkat. Aktivitas perdagangan berkaitan dengan juga perindustrian, diharapkan aktivitas perindustrian di Kabupaten Jayawijaya dapat meningkat sehingga kedepan mampu menciptakan produk turunan pada komoditas unggulan diberbagai sektor primadona.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayawijaya, merupakan bentuk kinerja aktivitas ekonomi yang terjadi. Kondisi perekonomian Kabupaten Jayawijaya mengalami pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat. Terlihat pada Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kabupaten Jayawijaya mencapai 4,54 persen menjadi 7,07 persen pada tahun 2020. Kondisi perekonomian berdasarkan sektor yang cukup kondusif pada sektor Konstruksi dengan rata-rata sebesar 8,68 persen sedangkan untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,74 persen, dan selanjutnya pada sektor Transportasi dan Pergudangan dengan rata-rata sekitar 6,97 persen dan juga pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebanyak 7.56 persen. Sektor-sektor tersebut yang cukup memainkan peran penting dalam struktur PDRB yang mana diduga sebagai pendorong Pertumbuhan Ekonomi Pada Tahun 2020 di Kabupaten Jayawijaya. Secara khusus berdasarkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan bahwa keberadaan masyarakat dominan berada pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mana dengan rata-rata pertumbuhan sepanjang tahun 2016-2020 hanya sebesar 3.18 persen. Untuk itu, dalam kerangka pembangunan ekonomi yang berkeadilan tentunya perlu memprioritaskan terhadap kebijakan-

kebijakan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian.

Pendapatan perkapita digunakan oleh para perencanaan wilayah, pengembangan wilayah, studi pembangunan, ekonomi, dan lainnya untuk mengkaji kemajuan suatu wilayah. Indikator ini sebenarnya pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah. Sehingga kemajuan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya selama ini dapat dipotret melalui salah satu indikator yaitu PDRB Per Kapita.



Gambar 5. PDRB Per Kapita Kabupaten Jayawijaya Tahun 2016-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, Data Dalam Angka (DDA), Data diolah Tahun 2021

Semakin tinggi PDRB perkapita di Kabupaten Jayawijaya, maka semakin tinggi tingkat perekonomian wilayah dan semakin maju aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan perumusan perhitungan tersebut, diketahui kemakmuran dan kemajuan wilayah tidak hanya ditentukan oleh besarnya angka PDRB, namun juga ditentukan oleh besarnya jumlah penduduk di kabupaten Jayawijaya. Maksudnya, adalah jika penduduk terlalu besar, maka dapat memperkecil pendapatan perkapita. Terlihat dari data pada gambar diatas menunjukkan bahwa peningkatan realisasi pendapatan perkapita dimana pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp.19,699,721 per tahun, berada dibawah perndapatn perkapita Provinsi

papua sebesar Rp. 32.620.000,- seringkali peningkatan angka pendapatan perkapita tidak selaras dengan kondisi masyarakat yang berada di kampung- kampung. Hal ini terjadi disebabkan distribusi pendapatan antar wilayah yang kurang merata, ataupun aktivitas ekonomi hanya disumbangkan pada sektor tertentu ataupun pada pusat ibukota kabupaten Jayawijaya.

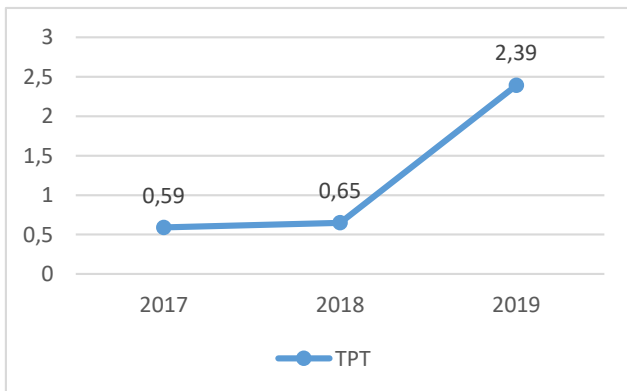
Angka garis kemiskinan di Kabupaten Jayawijaya cenderung menurun ke arah yang positif yaitu pada tahun 2016 pada indeks 39,66 angkanya menurun pada indkes 38,62 tahun 2017, dan kembali menurun tahun 2019 sebesar 38,33. Penduduk miskin di Kabupaten Jayawijaya lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk miskin Provinsi Papua sebesar 27,26 persen. Berdasarkan pola peregerakan angka kemiskinan di Kabupaten Jayawijaya, terdapat permasalahan pembangunan yang kurang merata hingga pada cakupan kampung.

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM di Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan yang begitu signifikan. IPM kabupaten Jayawijaya masih masuk dalam kategori IPM rendah. IPM Kabupaten Jayawijaya sebesar 54,96 pada tahun 2016 meningkat menjadi 55,99 pada tahun 2017. Pada provinsi Papua, Kabupaten Jayawijaya berada pada urutan ke 14 dari 29 Kabupaten/Kota lebih rendah dari IPM Provinsi Papua sebesar 59,09 namun paling tinggi dibandingkan kabupaten lainnya di wilayah Lapago. Melihat kondisi tersebut, maka dimasa mendatang pemerintah Kabupaten Jayawijaya perlu mendukung program-program bidang pendidikan maupun bidang lain yang dapat meningkatkan IPM di Kabupaten Jayawijaya. Sepanjang tahun 2016- 2020 terlihat perkembangan IPM meningkat positif, namun peningkatan tersebut belum merubah kriteria IPM di Kabupaten Jayawijaya tetap pada kriteria sedang.

Untuk itu beberapa komponen pembentuk IPM perlu menjadi perhatian penting kedepan khususnya beberapa indikator makro yang mampu mendukung akselerasi pembangunan manusia.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka taun 2017-2019 di Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 6. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jayawijaya Tahun 2017-2019.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Dalam Angka (DDA), Tahun 2020

Dari data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 penduduk usia kerja yang terserap dalam dunia kerja sekitar 59 persen, sisanya tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan dan tidak mau bekerja.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN ditentukan kawasan strategis nasional yang ada di Kabupaten Jayawijaya adalah Taman Nasional Lorentz.

Nilai-nilai sosio-ekonomi TN. Lorentz sebagai warisan dunia belum ditelaah secara signifikan. Taman Nasional Lorentz memiliki potensi menyumbangkan manfaat sosio-ekonomi bagi kepemilikan tradisional, masyarakat lokal serta masyarakat Papua pada umumnya. Pengakuan dunia terhadap nilai-nilai warisan alam Lorentz yang menonjol yang tercantum sebagai warisan dunia berpotensi menumbuhkan rasa bangga bagi masyarakat Papua. Namun sampai program sosialisasi dilaksanakan, banyak masyarakat Papua

tidak menyadari keberadaan Lorentz, apalagi makna signifikansinya secara global.

Sejalan dengan pengakuan secara global tersebut muncul bantuan dunia, seperti AusAID melalui Australia-Indonesia Government Sector Linkage Programme. Hal ini merupakan langkah awal bantuan dunia, baik pendanaan maupun pelayanan, yang akan membantu program perlindungan dan pengembangan yang sesuai bagi TN. Lorentz. Dalam upaya memfasilitasi pembangunan masyarakat asli yang berada di dalam kawasan, dibutuhkan pendanaan khusus untuk menjamin hasil yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan taman nasional. Pemanfaatan dan pengembangan kaeasan yang sesuai, termasuk pariwisata yang berbasis alam, terutama eko-wisata yang sesuai definifisinya harus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Agenda pembangunan bidang ekonomi sebagaimana tertuang pada misi ke ketiga dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018–2023 adalah “Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan”, dan tujuan yang terkait langsung Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya adalah; 1) Meningkatkan akses kesempatan kerja bagi masyarakat dan 2) Meningkatkan Meningkatnya perekonomian pada sektor ekonomi produktif.

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Dokumen Perjanjian Kinerja, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan memuat 2 (dua) sasaran strategis. Kedua sasaran strategis tersebut sebagai berikut: (1).

Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan khususnya Orang Asli Papua (OAP); (2). Meningkatnya daya saing sektor ekonomi produktif.

Balai Latihan Kerja (BLK) adalah gedung yang digunakan sebagai tempat berlatih dan menambah ketrampilan untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja. Dengan tersedianya Balai Latihan Kerja dapat menjadi langkah efektif dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja di daerah. Dengan demikian, alumni BLK akan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kerja untuk mengembangkan diri dalam dunia industri maupun usaha wiraswasta secara mandiri karena BLK adalah pilihan, harapan, dan karir masa depan yang menjadi tiket pekerja profesional dan pengusaha yang tangguh.



Gambar 7. Peserta Orang Asli Papua (OAP) Jayawijaya mengikuti kegiatan pelatihan Perbengkelan dan Pertukangan.

Pelatihan yang dilaksanakan hanya dikhususkan bagi anak-anak asli Papua Jayawijaya, dengan tujuan agar setiap peserta pelatihan bisa mendapatkan pengalaman kerja baik di bidang perbengkelan dan juga pertukangan.

Selain itu, melalui pelatihan pertukangan dan perbengkelan, Disnakerindag Kabupaten Jayawijaya terus berupaya membuka dan menciptakan kesempatan lapangan kerja kepada anak-anak asli Jayawijaya, terutama dalam upaya menekan dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Jayawijaya yang cukup tinggi.

Diharapkan juga Peserta pelatihan, agar dalam proses pelatihan, peserta dapat belajar dan benar-benar memahami apa yang diajarkan dalam kegiatan pelatihan, sehingga setelah mengikuti kegiatan pelatihan, setiap peserta dapat berbuat suatu karya yang baik di bidang perbengkelan dan pertukangan, yang tentunya bisa mendorong pendapatan dan penghasilan keluarga masing-masing.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan sebelumnya, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah kabupaten Jayawijaya. Pengaruh positif pada hubungan kedua variabel ini menjelaskan bahwa pengembangan wilayah akan langsung mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten jayawijaya.
2. Melalui hadirnya Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan maka, Pemerintah diharapkan agar dapat membuka dan menciptakan kesempatan lapangan kerja kepada anak-anak asli jayawijaya, terutama untuk menekan dan mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Jayawijaya yang cukup tinggi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, S. F. (2016), "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta" *Jurnal Ekonomi*, 1-15.

- Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 71.
<https://doi.org/10.22219/jep.v15i1.464>
- Anny Widiasmara. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 2(1), 45–56.
- Asmuruf, Makdalena F Rumat, V. A., & Kawung, G. M. V. (2015). Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 732.
- AZ, S. M., & Pebrina, S. (2019). Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(1), 36.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i1.54>
- Ernan Rustiadi. (2009) : Pengembangan Wilayah.
- Hadjisarosa, P. (1980). Konsep Dasar Pengembangan Wilayah. Bandung: DPU.
- Kadafi, M.F. (2013), "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Konveksi Kota Malang" *Jurnal ilmiah*, 1-45.
- Maulia, P. (2014), "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2011" *Jurnal Ekonomi*, 1-45.
- Pratyaningsih, A. (2016), "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Besar Dan Sedang Se-Ekskaresidenan Surakarta Tahun 2006-2013" *Jurnal Ekonomi*, 1-15.
- Tri, B. A. (2012) Pengembangan Kawasan Agropolitan Imogiri Agropolitan pembangunan pedesaan, strategi pengembangan, daya saing.